

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2018, April). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo*, 1(1), 15-16.
- Anggito, A. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Ariani, N. V. (2017). Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Kesadaran Hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 39.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Basri, Johan, & Hairul. (2021, Mei). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lembok Timur. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 2721-2653.
- Buvabaevna, K. K. (2022). Raising The Legal Awareness and Legal Culture Of Citizens In Society. *International Scientific Journal*, 8(2).
- Digdoyo, E. (2015). Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. In *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (p. 18). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2022, November). Retrieved 2 Maret, 2023. from BPS : *Statistik Kriminalitas Provinsi DKI Jakarta 2021.pdf*
- Harlina, A. (2019). Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Dihubungkan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum (Studi Kasus di Kelurahan Sukagalih dan Desa Karyamukti Kabupaten Garut.
- Jumriati. (2022, Agustus). Pembinaan TK/TPA Nurul Jannah di Desa Hulo Kecamatan Kahu. *Jurnal Panrita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 40-48
- Kholberg, L. (1995). *Tahap Tahap Perkembangan Moral Lawrence Kholberg*. (J. d. Santo, & A. Cremers, Trans.) Yogyakarta : Kanisius.
- Lathiffuddin, I. (2021). Strategi Pembinaan Muallaf di Masjid Piti Andre Al-Hikmah Wlahar Kulon, Patikraja, Banyumas.
- Legal Smart Center. (2023). from BPHN: <https://lsc.bphn.go.id/downloadfile>
- Moleong, P. L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

- Oksimana, O. (2020, Juni). Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. *Penelitian Hukum De Jure*, 20 (2), 245-258.
- Rantumbanu, Kasenda & Undap. (2017). Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*.
- Rosina, E. (2014). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Tapis*, 4.
- SE Kepala BPHN Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2022. *Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum*.
- Setiadi. (2013). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenadamedia.
- Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum. In *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (p. 182). Jakarta: Rajawali.
- Tehupeiory, A., & Naibaho, L. (2020). Enhancing Community Legal Awareness of Legal Aid Institutions. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(8).
- Wulandari, T. (2017). Kajian terhadap Efektifitas Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dalam upaya meningkatkan kepatuhan Hukum masyarakat . *Tanjungpura Journal of Law*, 13(1).
- Yogi, S. S., Dedi, S., & Slamet, U. I. (2022, Agustus). Pendampingan Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya meraih Penghargaan Desa Sadar Hukum. *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2).
- Yuliasari, P. (2019, Desember). Implementasi Peraturan Kepala Bphn Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Program Desa Sadar Hukum. *Jurnal Civicus*, 19(2), 39-48.
- Zulfani, S. I. (2021). Implementasi Kebijakan Lurah dalam Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Pada Masyarakat Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(1), 32-48.
- Zulfi, P. A. (2017). Pembentukan Keluarga Sadar Hukum dan penyuluhan hukum bagi perempuan terhadap hak-hak sebagai konsumen menurut Undang-Undang perlindungan konsumen. *Abdimas Talenta*, 2(2).